



DINAS
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
K O T A B A T A M

-  cipkataru.batam.go.id
-  media center pemko batam
-  pemkobatam

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKI/IP)
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2021. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Selain itu Peraturan Menteri PAN & RB Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam serta Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026. Dijelaskan pula upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas pada tahun 2021, tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada Tahun 2021 yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada Tahun 2021 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam di Tahun 2022.

Akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah SWT, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai



dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Ke-ciptakaryaan yang berkelanjutan.

Batam, Januari 2022
Plh. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



M.ARMAN, S.STP

Pembina TK. I

NIP. 19800909 199912 1 002



DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
1.4.1. Tugas pokok dan fungsi OPD	7
a. Sekretariat	10
b. Bidang Prasarana Bangunan Gedung	10
c. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah	10
d. Bidang Tata Ruang	11
e. Bidang Bina Konstruksi	11
f. Kelompok Jabatan Fungsional	11
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)	11
1.4.2. Struktur Organisasi	12
1.4.3. Sumber Daya Manusia	13
1.4.4. Sarana dan Prasarana	16
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1. RENCANA STRATEGIS	20
2.2. VISI DAN MISI	20
2.3. TUJUAN DAN SASARAN	25
2.4. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	26
2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA	28
2.6. PERENCANAAN KINERJA	30
2.7. PENETAPAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	35
3.1. EVALUASI KINERJA	36
3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	37
3.3. REALISASI KEUANGAN	52
BAB IV PENUTUP	57
4.1. KESIMPULAN	57
4.2. REKOMENDASI	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Hubungan Sasaran Strategis Dengan Program OPD
Tabel 1.2	:	Sumber Daya Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel 1.3	:	Daftar Sarana Dan Prasarana Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel 2.1	:	Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Batam Terpilih
Tabel 2.2	:	Misi, Tujuan Dan Sasaran, Urusan Dan Program RPJMD Terkait Dengan Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel 2.3	:	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2021
Tabel 2.4	:	Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.5	:	Perencanaan Kinerja
Tabel 2.6	:	Penetapan Kinerja
Tabel 3.1	:	Pengukuran Kinerja
Tabel 3.2	:	Analisis Pencapaian Sasaran I
Tabel 3.3	:	Rekapitulasi Dokumen Tata Ruang
Tabel 3.4	:	Analisis Pencapaian Sasaran II
Tabel 3.5	:	Rekapitulasi Pengawasan
Tabel 3.6	:	Rekapitulasi Pembangunan/Rehabilitasi/Revitalisasi
Tabel 3.7	:	Analisis Pencapaian Sasaran III
Tabel 3.8	:	Analisis Pencapaian Sasaran IV
Tabel 3.9	:	Rekapitulasi Sr Air Bersih Kota Batam S.D Akhir Tahun 2021
Tabel 3.10	:	Analisis Pencapaian Sasaran V
Tabel 3.11	:	Rekapitulasi Sr Sanitasi Kota Batam S.D Akhir Tahun Analisis 2021
Tabel 3.12	:	Pencapaian Sasaran VI
Tabel 3.13	:	Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Tabel 3.14	:	Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran, Indikator, Program,



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 yang memuat rencana kerja, tingkat capaian, realisasi dari indikator-indikator sasaran yang ditempuh melalui strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010). LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Inpres no 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dalam rangka penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dari analisis terhadap 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 6 (enam) indikator Kinerja utama yang dipergunakan sebagai tolak ukur dengan rincian capaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten.
Didukung anggaran dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar **Rp. 3.511.795.000,-** atau **2.25 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 3.007.722.700,-** atau **2.09 %**



Indikator Sasaran : Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **54.95 %** terrealisasi sebesar **78.24 %** dengan interpretasi **Melampaui Target (142,38%)**

Sasaran Strategis : Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

II

Didukung anggaran dari Program Penataan Bangunan Gedung sebesar **Rp. 75.012.959.248,-** atau **48.08 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 67.990.608.103,-** atau **47.31 %**

Indikator Sasaran : Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **16.67 %** terrealisasi sebesar **21.82 %** dengan interpretasi **Melampaui Target (130.89%)**

Sasaran Strategis : Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.

III

Didukung anggaran dari Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar **Rp. 200.471.000,-** atau **0.13 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 176.479.240,-** atau **0.12 %**

Indikator Sasaran : Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi



- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **17.23 %** terrealisasi sebesar **17.66 %** dengan interpretasi **Melampaui Target (102.5%)**

Sasaran Strategis : Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih.
IV Didukung anggaran dari Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar **Rp. 54.708.665.371,-** atau **35.07 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 51.605.930.667,-** atau **35.91 %**

Indikator Sasaran : Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **43.49 %** terrealisasi sebesar **43.85 %** dengan interpretasi **Melampaui Target (102.5%)**

Sasaran Strategis : Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi.
V Didukung anggaran dari Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar **Rp. 3.249.481.600,-** atau **2.08 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 3.245.828.306,-** atau **2.26 %**

Indikator Sasaran : Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **12.22 %** terrealisasi sebesar **12.16 %** dengan interpretasi **tidak mencapai Target (99.51%)**

Sasaran Strategis : Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
VI Didukung anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 19.334.926.486,-** atau **12.39 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 17.693.400.176,-** atau **12.31 %**
 Persentase terpenuhinya penunjang urusan

Indikator Sasaran : pemerintahan Daerah



- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target 100 % terrealisasi sebesar 100 % dengan interpretasi **mencapai Target (102.5%)**

Dari 6 (enam) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, capaian kinerja rata-rata pada tahun 2021 dengan interpretasi **Melampaui Target**.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang bersumber dari APBD Perubahan sebesar **Rp. 156.018.298.705,-** dan realisasi pengeluaran sebesar **Rp. 143.719.969.192,-** mencapai **92.12 %** dengan sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 12.297.139.778,-** atau **7.88%**.

Capaian indicator outcome dalam tahun 2021 telah tercapai yaitu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bata mini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja guna menyempurnakan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk tahun yang akan datang.





BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjaabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instasni pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2021 merupakan wujud Akuntabilitas dan Transparansi pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2021 ini pada dasarnya merupakan kewajiban yang menjadi keharusan Instansi Pemerintah dalam memberikan penjelasan secara tertulis mengenai pertanggungjawaban terhadap Kinerja/Realisasi yang telah dilakukan selama tahun 2021. Penyusunan LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

LKjIP tahun 2021 merupakan bagian dari informasi Pengukuran Kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Cipta



Karya dan Tata Ruang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Kota Batam Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada public baik yang bersifat teknis maupun non teknis harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2021

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan



- Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.6 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Menteri PAN & RB Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor..... Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026
29. Peraturan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);



31. Perda Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026
32. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472);
33. Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
34. Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Bersih Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 594);
35. Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Menara Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP tahun 2021 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai penjabaran dari Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Sehingga LKjIP ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021 adalah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang agar pencapaian program dan kebijakan dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.



1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2021-2026 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mempunyai beberapa sasaran strategis dalam RPJMD 2021-2026. Sasaran strategis tersebut yang kemudian dituangkan dalam beberapa program dalam rencana strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun anggaran 2021-2026. Untuk melihat hubungan sasaran srategis dan program OPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 :
HUBUNGAN SASARAN STRATEGIS DENGAN PROGRAM OPD

No	Sasaran Strategis	Program OPD
1	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Program Penataan Bangunan Gedung
5	Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
6	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tugas pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok yang terdiri atas :

- a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Prasarana Bangunan Gedung (termasuk menara telekomunikasi), Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *Reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. menyelenggarakan sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan;



- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas oleh para Kepala Bidang;
- o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- p. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendaharawan Penerimaan, sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- q. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- r. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- s. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
- u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam terdiri atas :

a. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Bidang Prasarana Bangunan Gedung

Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Bangunan Gedung.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Prasarana Bangunan Gedung terdiri dari :

- a. Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung
- b. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung
- c. Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Gedung

c. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah

Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah terdiri dari :

- a. Seksi Bina Teknik Air Bersih dan Air Limbah
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Seksi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah



d. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Tata Ruang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
- b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
- c. Seksi Pengendalian Tata Ruang

e. Bidang Bina Konstruksi

Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Bina Konstruksi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Bina Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- b. Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
- c. Seksi Bina Kompetensi dan Produksi Jasa Konstruksi

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Bersih

UPT Pengelolaan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan air bersih kepada masyarakat yang sarana dan prasarannya dikelola oleh OPD.

Susunan organisasi UPT Pengelolaan Air Bersih terdiri dari :

- Kepala UPT PAB
- Sub Bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan fungsional

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara

UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian



bangunan gedung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara terdiri dari :

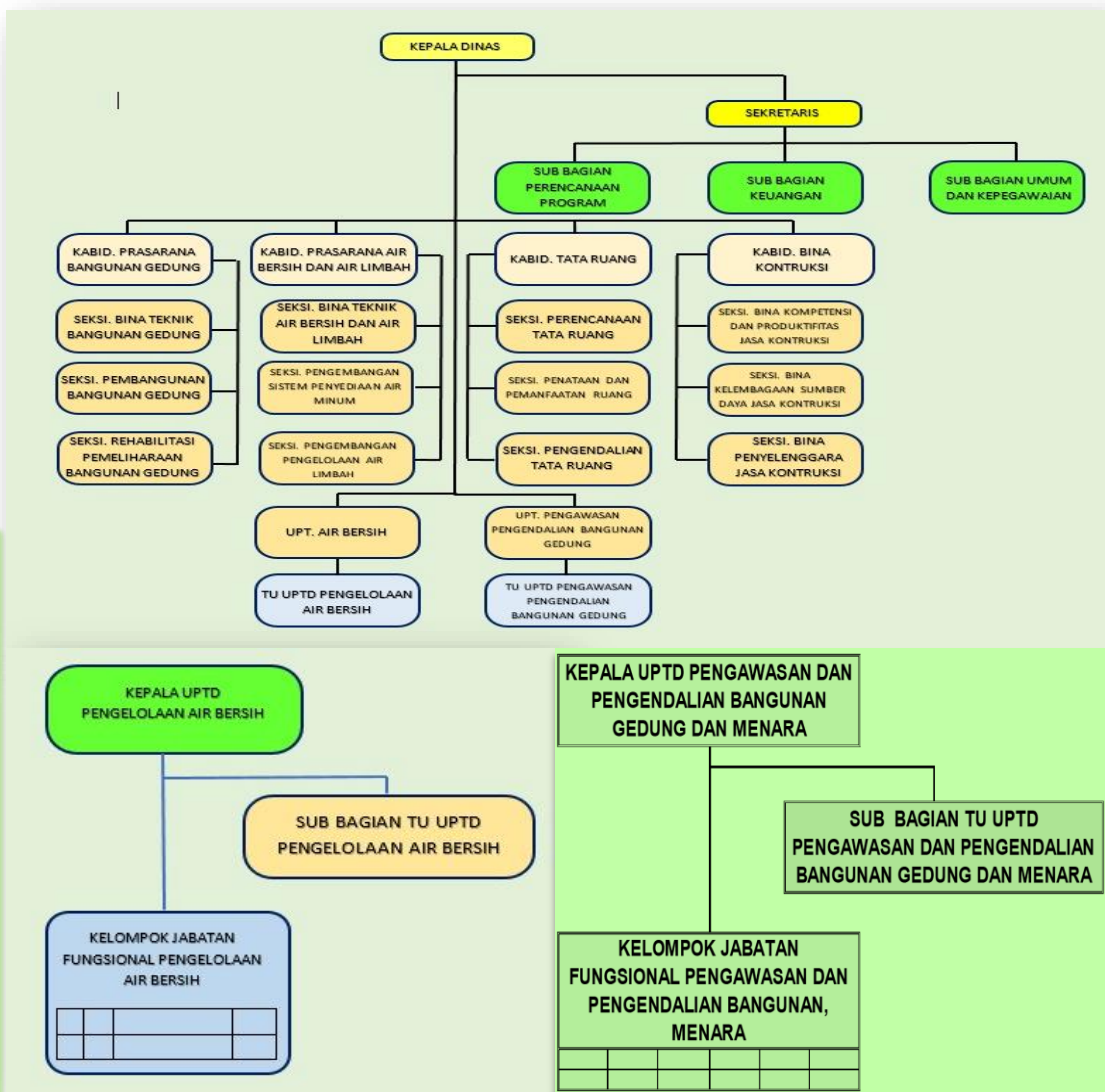
- Kepala UPT,
- Sub Bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan fungsional

1.4.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM



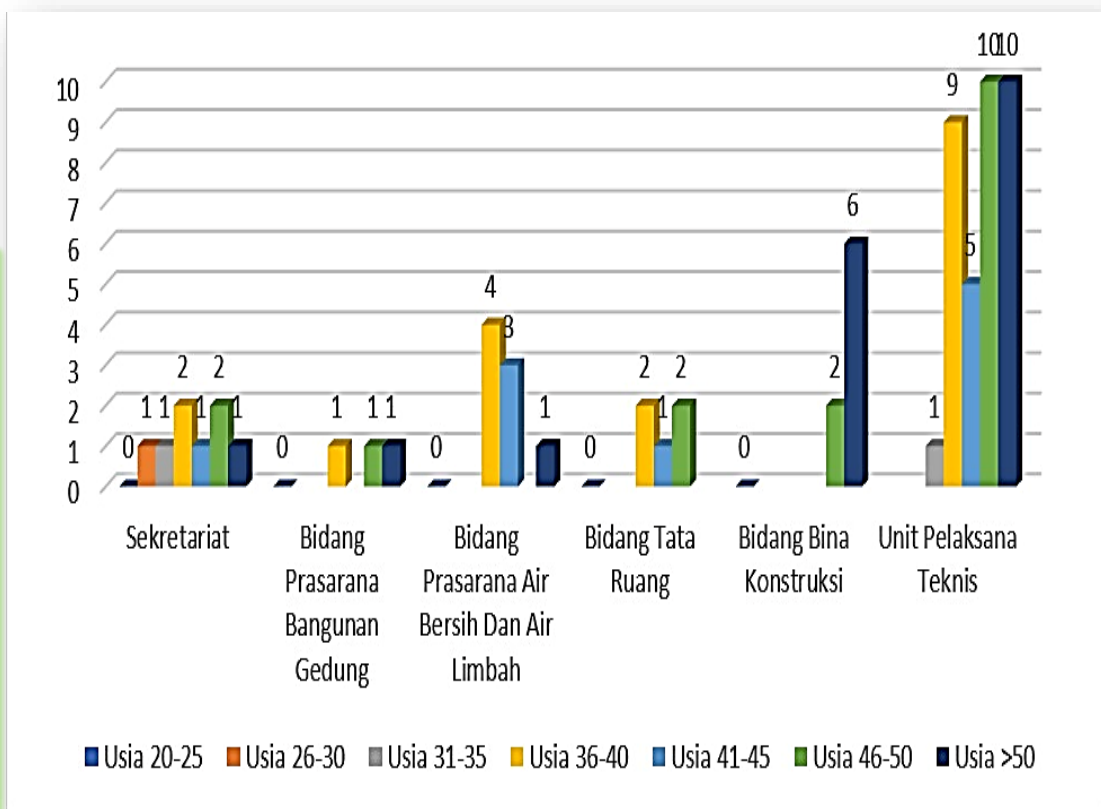
1.4.3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang didalam pemerintahan disebut dengan Sumber Daya Aparatur, merupakan unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintah dan memegang peranan utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target dan sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sampai akhir tahun RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Tabel 1.2 :
SUMBER DAYA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

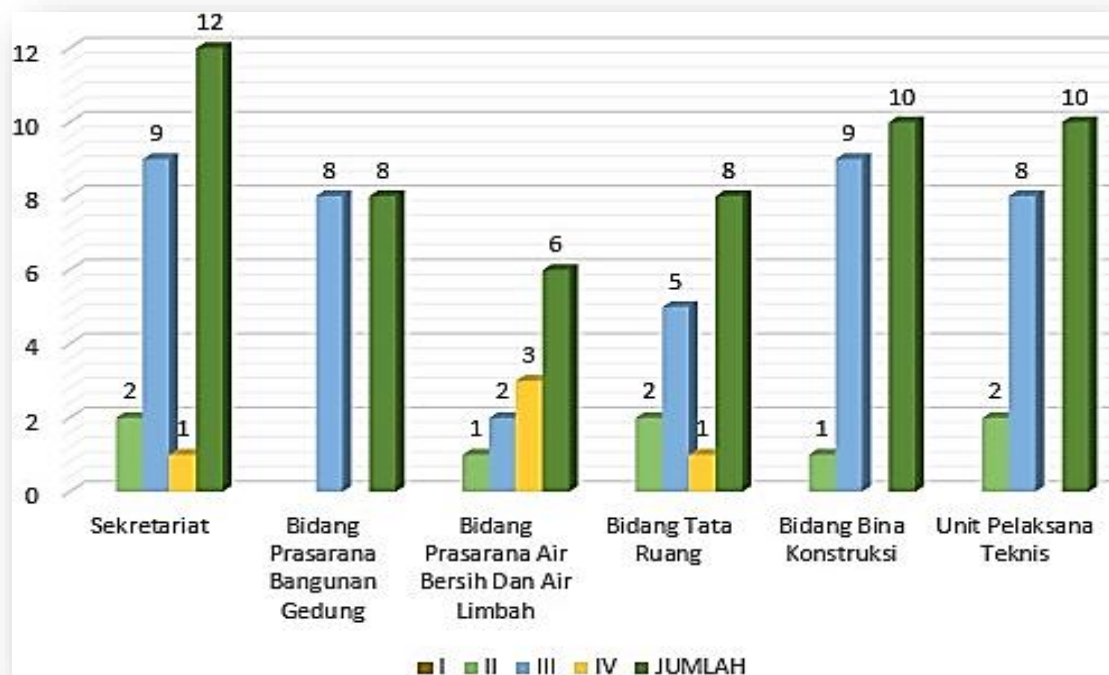
JUMLAH PEGAWAI MENURUT KELOMPOK UMUR

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	3	1	4	4	12
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	1	2	1	2	1	-	1	8
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	-	1	-	1	1	2	1	6
4	Bidang Tata Ruang	-	4	3	-	1	-	-	8
5	Bidang Bina Konstruksi	-	2	1	2	-	3	2	10
6	Unit Pelaksana Teknis	-	-	-	2	6	2	-	10
TOTAL		1	9	5	10	10	11	8	54



JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

No	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	9	1	12
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	-	-	8	-	8
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	-	1	2	3	6
4	Bidang Tata Ruang	-	2	5	1	8
5	Bidang Bina Konstruksi	-	1	9	-	10
6	Unit Pelaksana Teknis	-	2	8	-	10
TOTAL		-	8	41	5	54



JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

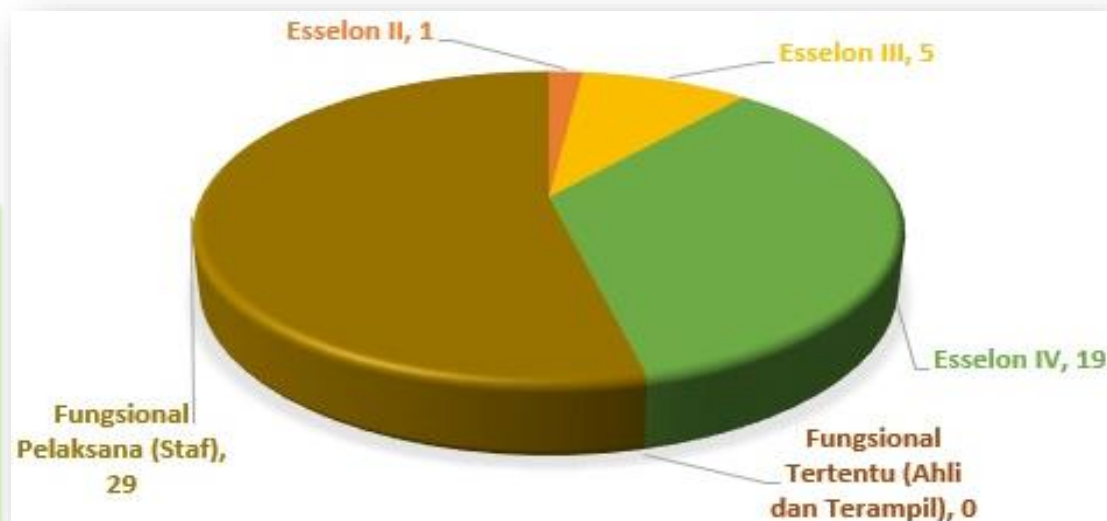
No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				JUMLAH
		SM A	Diplo ma	S1	S 2	
1	Sekretariat	3	1	8	-	12
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	-	-	8	-	8
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	1	1	3	1	6
4	Bidang Tata Ruang	-	2	2	4	8
5	Bidang Bina Konstruksi	-	1	7	2	10
6	Unit Pelaksana Teknis	2	-	7	1	10
TOTAL		6	5	35	8	54





JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN

No	Jabatan	Jumlah
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	19
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	29
TOTAL		54



Sesuai matrik diatas kebutuhan Sumber Daya dari PNS masih sangat minim sekali, terutama untuk tenaga teknis di bidang-bidang, sehingga diharapkan untuk tahun-tahun mendatang kebutuhan PNS tenaga teknis dapat



tersedia dan terlaksana melalui rekrutmen di BKPSDM Kota Batam dari sisi kualitas tenaga teknis dari pengadaan PNS. Sehingga diharapkan dengan terpenuhinya tenaga teknis tersebut dapat mengimbangi beban kerja Perangkat Daerah yang semakin tinggi guna menyelesaikan target-target yang telah disepakati di RPJMD 2021-2026.

Untuk meningkatkan kinerja OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dibutuhkan peningkatan kompetensi dan keahlian terutama bidang teknis dan administrasi pemerintahan merupakan hal penting yang harus dipenuhi kedepannya. Dengan adanya peningkatan kompetensi dan keahlian tersebut diharapkan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam akan lebih optimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target dan sasaran dinas dan pelayanan kepada masyarakat kedepannya.

1.4.4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Kondisi saat ini untuk penunjang kinerja pegawai merupakan pengadaan lama yang masih digunakan, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan kinerja pegawai. Sebagian besar merupakan pindahan aset dari dinas lama (Tata Kota dan PU) yang dilebur menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Untuk itu diharapkan setiap tahunnya sarana dan prasarna penunjang dapat terus dilakukan peremajaan dan penambahan, sehingga dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai lebih baik lagi.

Perlengkapan sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.3 :
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KOTA BATAM

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	A.C. Split	26 unit	26	-	
2	Alat Pemeriksa Beton	1 unit	1	-	
3	Alat Penghancur Kertas	10 unit	10	-	
4	Camera Digital	2 unit	2	-	
5	Camera Electronic	2 unit	2	-	
6	CCTV - Camera Control Television System	1 unit	1	-	
7	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1 unit	1	-	
8	Control Panel (scada)	1 unit	1	-	
9	Dispenser	2 unit	2	-	
10	External HD	6 unit	6	-	
11	Facsimile	1 unit	1	-	
12	Filing Cabinet Besi	10 unit	10	-	
13	Flow Meter	2 unit	2	-	
14	Genset	15 unit	15	-	
15	Hadled Printer	1 unit	1	-	
16	Kamera Udara	1 unit	1	-	
17	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lainnya	1 unit	1	-	
18	Kitchen Set	1 unit	1	-	
19	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	43 unit	43	-	
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1	-	
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 unit	5	-	
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18 unit	18	-	
23	Kursi Rapat	15 unit	15	-	
24	Lap Top	5 unit	5	-	
25	Layar Film/Projector	2 unit	2	-	
26	LCD Projector/Infocus	1 unit	1	-	
27	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 unit	2	-	
28	Lemari dan Arsip Pejabat Lainnya	5 unit	5	-	
29	Local Area Network (LAN)	1 unit	1	-	
30	Meja 1/2 Biro	9 unit	9	-	
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	49 unit	49	-	
32	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1	-	
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 unit	6	-	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	21 unit	21	-	
35	Meja Rapat	1 unit	1	-	
36	Meja Resepsionis	1 unit	1	-	
37	Mesin Absensi	6 unit	6	-	
38	Mesin Bor Beton	1 unit	1	-	
39	Mesin Fotocopy Folio	1 unit	1	-	



No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
40	Mesin Pemotong Rumput	6 unit	6	-	
41	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 unit	1	-	
42	Monitor	1 unit	1	-	
43	Motor Boat	1 unit	1	-	
44	Note Book	10 unit	10	-	
45	P.C Unit	45 unit	45	-	
46	Papan Pengumuman	1 unit	1	-	
47	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 unit	1	-	
48	Pick Up	6 unit	6	-	
49	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1 unit	1	-	
50	Pita Ukuran (Meteran)	6 unit	6	-	
51	Pompa Air	14 unit	14	-	
52	Portable Water Pump	11 unit	11	-	
53	Pressure Tranducer	2 unit	2	-	
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43 unit	43	-	
55	RF Laser (Alat Ukur Tanah)	5 unit	5	-	
56	Router	4 unit	4	-	
57	Router	1 unit	1	-	
58	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6 unit	6	-	
59	Sedan	2 unit	2	-	
60	Sekoci Motor Tempel	8 unit	8	-	
61	Sepeda Motor	1 unit	1	-	
62	Sofa	3 unit	3	-	
63	Sound System	1 unit	1	-	
64	Speed Boat / Motor Tempel	8 unit	8	-	
65	Station Wagon	3 unit	3	-	
66	Submersible Pump	12 unit	12	-	
67	Switch	3 unit	3	-	
68	Tablet PC	1 unit	1	-	
69	Tangki Air	6 unit	6	-	
70	Televisi	9 unit	9	-	
71	Uninterruptible Power Supply (UPS)	17 unit	17	-	
72	Wireless Access Point	2 unit	2	-	
73	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6 unit	6	-	
74	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	68 unit	68	-	
75	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit	1	-	
76	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	6 unit	6	-	
77	Bangunan Panggung	1 unit	1	-	
78	Gedung Pos Jaga Permanen	13 unit	13	-	
79	Gerbang/Gapura	1 unit	1	-	
80	Pagar Permanen	13 lokasi	13	-	
81	Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat	1 unit	1	-	



No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
82	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	37 unit	37	-	
83	SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	21 Lokasi	21	-	
84	SWRO (Sea Water Reverse Osmosis)	1 Lokasi	1	-	
85	IKK (Instalasi	2 lokasi	2	-	
86	Waduk	20 lokasi	20	-	
87	SPALD	33 lokasi	33	-	
88	SR Air Bersih	6.126 SR	6.126	-	
89	SR Sanitasi	1.580 SR	1.580	-	

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan hal-hal umum tentang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam serta uraian singkat tentang gambaran umum Dinas.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, serta gambaran singkat sasaran yang diraih oleh Dinas pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi dan perjanjian kerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. VISI DAN MISI

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang.



Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai ditahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Bandar Dunia** : mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".
- 2. Madani** : bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, ber peradaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society*.
- 3. Sejahtera** : mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
- 4. Modern** : mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong *pentahelix* pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.



Untuk mencapai visi “**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021 – 2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompokmasyarakat maupun wilayah.

Misi 2 : **Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.**

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

Misi 3 : **Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia**



Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

Misi 4 : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber



daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam

Berdasarkan permasalahan yang ada dan potensi yang termuat dalam RPJMD tahun 2021-2026 telah dirumuskan isu strategis berjangka panjang dan mendasar, secara bertahap menjadi masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi tersebut tentunya juga akan berupaya menuangkan dalam program kegiatan dan sub kegiatan sebagai bentuk pelayanan dan kinerja secara nyata agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan efisien.

Secara penyelenggaraan urusan dan kinerja, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengampu secara teknis 2 (dua) misi yakni misi nomor 2 (dua) dan misi nomor (4) yang menjadi sasaran kinerja secara eksplisit. OPD tidak mempunyai visi dan misi sendiri. OPD hanya menjalankan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melaksanakan Misi No. 2 dan No. 4

Tabel 2.1.
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BATAM TERPILIH

No	Misi	Peran OPD
Visi : Walikota dan Wakil Walikota Terpilih “TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”		
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	
2	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur,	Terciptanya penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern sesuai peraturan dan perundang-undangan.



No	Misi	Peran OPD
	Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan Penyediaan, Fasilitas, Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Jasa Konstruksi Melalui Sosialisasi, Aplikasi Web dan Mobile Android, IOS serta Kompetensi Tenaga Terampil Kepada Masyarakat dan penguatan pengawasan Program : Pengembangan Jasa Konstruksi Meningkatkan Penyediaan, Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan yang responsif gender. Program : Penataan Bangunan Gedung
3	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia	
4	Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Cakupan Pelayanan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2.

**MISI, TUJUAN DAN SASARAN, URUSAN DAN PROGRAM RPJMD
TERKAIT DENGAN PERAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM**

Misi	RPJMD		RPJMD		RENSTRA DINAS CKTR			Program	Indikator Program
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		
Tersedianya infrastruktur	Terwujudnya peningkatan	Persentase Pemenuhan	Terwujudnya perencanaan, Pemanfaatan	Persentase ketersediaan Informasi mengenai	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap	Persentase ketersediaan informasi mengenai	Program Penyelenggaraan	Persentase tersedianya dokumen perencanaan



perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Infrastruktur Pekerjaan Umum	dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Penataan Ruang	, pemanfaatan dan pengendalian ruang
			Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola
						Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
					Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	
Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih
						Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi

2.4. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam meliputi :



Tabel 2.3. :
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan
I	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,118,158,969	19,334,926,486
	1.03.01.2.02	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,017,148,690	10,025,069,808
	1.03.01.2.02.01	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,766,108,690	9,778,979,808
	1.03.01.2.02.03	1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	251,040,000	246,090,000
	1.03.01.2.05	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,680,000	60,680,000
	1.03.01.2.05.02	2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60,680,000	60,680,000
	1.03.01.2.06	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,161,486,660	598,795,000
	1.03.01.2.06.01	3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,852,500	7,852,500
	1.03.01.2.06.02	3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,163,500	187,524,500
	1.03.01.2.06.04	3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193,107,000	125,592,000
	1.03.01.2.06.05	3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,275,000	22,775,000
	1.03.01.2.06.06	3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104,018,660	47,968,000
	1.03.01.2.06.09	3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	627,070,000	207,083,000
	1.03.01.2.07	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,387,796,000	2,387,796,000
	1.03.01.2.07.02	4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,406,490,000	1,406,490,000
	1.03.01.2.07.05	4.2 Pengadaan Mebel	159,875,000	159,875,000
	1.03.01.2.07.06	4.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	821,431,000	821,431,000
	1.03.01.2.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,367,757,760	1,318,728,760
	1.03.01.2.08.02	5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253,122,400	224,093,400
	1.03.01.2.08.03	5.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	-
	1.03.01.2.08.04	5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,094,635,360	1,094,635,360
	1.03.01.2.09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473,289,859	473,698,459
	1.03.01.2.09.02	6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154,358,000	166,866,600
	1.03.01.2.09.06	6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61,340,000	49,240,000
	1.03.01.2.09.09	6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257,591,859	257,591,859
	1.03.01.2.10	7. Peningkatan Pelayanan BLUD	4,650,000,000	4,470,158,459
	1.03.01.2.10.01	7.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4,650,000,000	4,470,158,459
II	1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	54,708,665,371	54,708,665,371
	1.03.03.2.01	8. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	54,708,665,371	54,708,665,371
	1.03.03.2.01.01	8.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	660,000,000	660,000,000
	1.03.03.2.01.03	8.2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	17,386,090,000	17,386,090,000
	1.03.03.2.01.05	8.3 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	26,711,905,000	26,711,905,000
	1.03.03.2.01.07	8.4 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	287,699,500	287,699,500
	1.03.03.2.01.15	8.5 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	9,662,970,871	9,662,970,871
III	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,251,623,600	3,249,481,600
	1.03.05.2.01	9. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,251,623,600	3,249,481,600
	1.03.05.2.01.03	9.1 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2,970,481,200	150,000,000
	1.03.05.2.01.04	9.2 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	281,142,400	281,142,400
	1.03.05.2.01.06	9.3 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-	2,818,339,200
IV	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	70,982,294,233	75,012,959,248
	1.03.08.2.01	10. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	70,982,294,233	75,012,959,248



No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Murni	Pagu Perubahan
			(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
	1.03.08.2.01.02	10.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	63,887,630,812	65,164,513,360
	1.03.08.2.01.12	10.2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2,093,467,539	4,847,250,006
	1.03.08.2.01.13	10.3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5,001,195,882	5,001,195,882
V	1.03.11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	438,902,000	200,471,000
	1.03.11.2.01	11	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	271,212,000	63,581,000
	1.03.11.2.01.06	11.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	121,606,000	-
	1.03.11.2.01.07	11.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	149,606,000	63,581,000
	1.03.11.2.02	12	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115,000,000	115,000,000
	1.03.11.2.02.06	12.1	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	115,000,000	115,000,000
	1.03.11.2.04	13	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	52,690,000	21,890,000
	1.03.11.2.04.03	13.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	52,690,000	21,890,000
VI	1.03.12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5,114,095,000	3,511,795,000
	1.03.12.2.01	14	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	4,819,100,000	3,216,800,000
	1.03.12.2.01.02	14.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4,819,100,000	3,216,800,000
	1.03.12.2.03	15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	128,600,000	128,600,000
	1.03.12.2.03.02	14.2	Sistem Informasi Penataan Ruang	128,600,000	128,600,000
	1.03.12.2.04	16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	166,395,000	166,395,000
	1.03.12.2.04.04	14.3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	166,395,000	166,395,000

2.5.INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).



Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. :
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Perhitungan	Satuan	Rencana Pencapaian IKU Tahun Ke -						Akhir Tahun 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	(Jumlah urusan penunjang yang ditangani tahun ke-n / Jumlah urusan penunjang yang ditangani selama 6 tahun) x 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	(Jumlah gedung yang ditangani tahun ke-n / Jumlah gedung yang ditangani selama 6 tahun) x 100 %	Persen	16.67	33.33	50	66.67	83.33	100	100
3	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	(Jumlah tenaga terampil yang disertifikasi dan dibina, sistem informasi jasa konstruksi dan meningkatnya pengawasan tahun ke n/ jumlah total selama 6 tahun) x 100 %	Persen	17.23	33.79	50.34	66.89	83.45	100	100
4	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	(Jumlah dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian / Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang) x 100%	Persen	54.95	76.92	82.42	87.91	93.41	100	100
5	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	(Jumlah KK penduduk terlayani air bersih tahun ke n / Jumlah KK penduduk di hinterland) x 100%	Persen	43.49	46.06	48.63	51.46	54.52	57.74	57.74
6	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	(Jumlah KK penduduk terlayani sanitasi tahun ke n / Jumlah KK penduduk di wilayah hinterland) x 100%	Persen	12.22	13.04	14.13	15.28	16.50	17.78	17.78



2.6. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan sumber dana dari APBD Kota Batam melalui belanja langsung sebesar **Rp 155.613.739.173,-** kemudian pada APBD P 2021 menjadi **Rp. 156.018.298.705,-** guna melaksanakan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2021-2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026 Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang direncanakan dalam tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.5. :
PERENCANAAN KINERJA

Sasaran	Indikator	Target (%)		Program/Kegiatan
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			4.2	Pengadaan Mebel
			4.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			7	Peningkatan Pelayanan BLUD
			7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



Sasaran	Indikator	Target (%)		Program/Kegiatan
Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	43.49 %	II	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			8.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			8.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			8.3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			8.4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	12.22 %	III	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			9.1	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
			9.2	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	16.67 %	IV	Program Penataan Bangunan Gedung
			10	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			10.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	17.23 %	V	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			11	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			11.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
			11.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
			12	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			12.1	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pemanfaatan tata ruang	54.95 %	VI	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			14	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
			14.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			14.2	Sistem Informasi Penataan Ruang
	16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	14.3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		



2.7.PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Agar supaya pencapaian indikator kinerja berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan perlu suatu komitmen bersama antara pimpinan OPD (Kepala Dinas) dengan Walikota Batam dalam suatu Penetapan Kinerja sebagaimana daftar berikut :

Tabel 2.6. :
PENETAPAN KINERJA

Sasaran	Indikator	Tar get (%)		Program/Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,334,926,486	
			1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,025,069,808	
				1.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,778,979,808
				1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	246,090,000
			2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,680,000	
				2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60,680,000
			3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	598,795,000	
				3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,852,500
				3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187,524,500
				3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125,592,000
				3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,775,000
				3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47,968,000
				3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207,083,000
			4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,387,796,000	
				4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,406,490,000
				4.2	Pengadaan Mebel	159,875,000
				4.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	821,431,000
			5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,318,728,760	
				5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224,093,400
				5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
				5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,094,635,360
			6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473,698,459	
				6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166,866,600
				6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,240,000
				6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257,591,859
			7	Peningkatan Pelayanan BLUD	4,470,158,459	

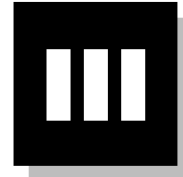


Sasaran	Indikator	Tar get (%)	Program/Kegiatan			Anggaran APBD Perubahan
				7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4,470,158,459
Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	43.4 9%	II	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		54,708,665,371
			8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		54,708,665,371
			8.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		660,000,000
			8.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		17,386,090,000
			8.3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		26,711,905,000
			8.4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		287,699,500
Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	12.2 2%	III	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		3,249,481,600
			9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		3,249,481,600
			9.1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota		150,000,000
			9.2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		281,142,400
			9.3	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		2,818,339,200
Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	16.6 7%	IV	Program Penataan Bangunan Gedung		75,012,959,248
			10	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		75,012,959,248
			10.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		65,164,513,360
			10.2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		4,847,250,006
			10.3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		5,001,195,882
Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	17.2 3%	V	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		200,471,000
			11	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		63,581,000
			11.1	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi		-
			11.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		63,581,000
			12	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		115,000,000
			12.1	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		115,000,000
			13	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		21,890,000
			13.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		21,890,000
Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	54.9 5%	VI	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		3,511,795,000
			14	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		3,216,800,000
			14.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		3,216,800,000
			15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		128,600,000
			14.2	Sistem Informasi Penataan Ruang		128,600,000



Sasaran	Indikator	Tar get (%)		Program/Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan
				16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	166,395,000
				14.3 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	166,395,000





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- Realisasi > Target : Melampaui Target
- Realisasi = Target : Mencapai Target
- Realisasi < Target : Tidak Mencapai Target



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, berdasarkan 4 sasaran dan 7 indikator kinerja.

3.1. EVALUASI KINERJA

Secara umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021–2026. Terdapat 6 (enam) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Cipta Karya Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
PENGUKURAN KINERJA

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	Persen	54.95	78.24	142.38	Melampaui Target
2	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	16.67	21.82	130.89	Melampaui Target
3	Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persen	17.23	17.66	102.50	Melampaui Target
4	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Persen	43.49	43.85	100.83	Melampaui Target
5	Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	Persen	12.22	12.16	99.51	Tidak mencapai target
6	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Mencapai Target



3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I :

Tersedianya Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Tata Ruang Kota Batam Yang Konsisten

**Tabel 3.2. :
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN I**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	14	15	16	17
1	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	Persen	54.95	78.24	142.38	78.24

Ruang lingkup pelaksanaan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan yang digunakan. Saat ini Kota Batam telah menyelesaikan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 119). Selain itu Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847), sehingga untuk pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang Kota Batam belum bisa optimal dilaksanakan.

Tingginya investasi yang masuk di Kota Batam baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah di perlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/



kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Standar Teknis, Ketentuan Peraturan Zonasi.

Solusi yang dilakukan untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Berikut daftar dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dihasilkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama Tahun 2021 :

Tabel 3.3 :
REKAPITULASI DOKUMEN TATA RUANG

No	Uraian	Jumlah Dokumen	Ket
1	Penetapan Perwako RDTR 7 BWP	1 dokumen	
2	Penyusunan perwako RDTR Sei Beduk	1 dokumen	
3	Penyusunan perwako RDTR Sagulung	1 dokumen	
4	Penyusunan perwako RDTR Belakang Padang	1 dokumen	
5	Kajian Awal Ranperwako Insentif/disinsentif dan Sanksi	2 dokumen	
6	Peraturan Teknis (Pertek) KRK	48 dokumen	
7	Informasi Tata Ruang	78 dokumen	
8	Aplikasi Informasi Administrasi Penataan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1 aplikasi/dokumen	
JUMLAH		132 Dokumen + 1 Aplikasi	

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran :



1. Pengawasan yang di lakukan oleh UPT Pengawasan bangunan dan Menara dilakukan secara kontinyu guna membangun kesadaran masyarakat dalam hal membangun sesuai Tata Ruang dan IMB. Pengawasan rutin yang dilakukan dapat berupa memberikan surat teguran/peringatan bagi yang tidak sesuai aturan. Selain itu keterlibatan perangkat daerah dari terkecil yakni RT/RW, pihak Kelurahan sampai Kecamatan merupakan sarana yang sangat efektif menyampaikan pesan dan informasi mengenai kesesuaian dalam membangun sesuai dengan Tata Ruang dapat segera disampaikan untuk ditindaklanjuti.

SASARAN STRATEGIS II :

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perkotaan

Tabel 3.4. :
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN II

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	14	15	16	17
1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	16.67	21.82	130.89	21.82

Pengukuran terhadap sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum dilaksanakan terhadap gedung kantor, fasilitas umum, 139 unit. Kondisi gedung pemerintah dan fasilitas umum yang kurang representatif yang dimaksud adalah kondisi gedung yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan layanan dan perkembangan tingkat kebutuhan saat ini dari tupoksi masing-masing instansi tersebut. Dengan kondisi tersebut di atas dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas agar lebih memberikan kenyamanan pelayanan sekaligus beautifikasi secara fisik dan dapat menampilkan performance sarana prasarana gedung yang lebih representatif. Selain jumlah unit bangunan baru yang dibangun, Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi/direnovasi/direvitalisasi dan Jumlah unit bangunan yang dipelihara/dirawat juga dilakukan Pengawasan bangunan gedung/menara yang



laksanakan oleh UPT Pengawasan bangunan gedung dan menara. Pengawasan ini menerapkan sanksi Perda tahap pertama yakni memberikan peringatan tertulis yakni berupa surat pemberitahuan, bahwa terdapat pelanggaran fungsi/persyaratan/penyelenggaraan bangunan gedung dan menara dilapangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat.

Tabel 3.5. :
REKAPITULASI PENGAWASAN

No	Uraian	Jenis Bangunan/Menara	Jumlah	Ket
1	Jumlah unit bangunan gedung dan Menara yang diawasi	Rumah Tinggal, Ruko, Workshop/Gudang, sekolah	60 unit	Tidak Memiliki IMB/ Jangka waktu IMB habis
		Green Field, Roof Top, Monopole, Self Supporting Tower, Mini Tower, Micro Cell Pole	377 unit	Tidak Memiliki IMB, Jangka waktu IMB Habis dan Menara yang dibongkar
2	Jumlah unit bangunan baru yang dibangun	Kantor Pemerintahan, Fasilitas umum	135 unit	
3	Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi/direnovasi/direvitalisasi	Kantor Pemerintahan	1 unit	
4	Jumlah unit bangunan yang dipelihara/dirawat	Fasilitas Umum	3 unit	
J U M L A H			576 unit	

Selama tahun 2021 peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.6. :
REKAPITULASI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/REVITALISASI

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Buliang	1 unit
2	Rehab Total Gedung Serba Guna Kampung Tengah RT 03 RW 01 Kelurahan Pemping	1 unit
3	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Tiban Makmur RT 005 RW 007	1 unit
4	Pembangunan Gedung Serba Guna di Wilayah RT.001 / RW.02 Setokok	1 unit
5	Pembangunan Gedung Sentra UKM Bida Ayu	1 unit
6	Pembangunan Gedung Serba guna (Fasum) Pantai Gading RT RW 18 Kel Tanjung Buntung	1 unit
7	Pembangunan gedung serba guna / fasum perum sarmen raya RT 05 RW 05	1 unit
8	Rehabilitasi gedung serba guna belakang Kantor Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar	1 unit



No	Uraian	Jumlah
9	Peningkatan gedung serba guna RW 04 RT 02 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar	1 unit
10	Pembangunan Gedung Serbaguna/Fasum, Perum Sengkuang Raya RT 01, RW 14	1 unit
11	Pembangunan Gedung Serba guna di Tg. Sengkuang Dalam RW 05 , Kel. Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar	1 unit
12	Pembangunan Serba Guna di Pesona Mantang RW 015 , Kel. Tg. Buntung Kec. Bengkong	1 unit
13	Pembangunan Gedung Serba Guna di Bengkong Telaga Indah RW 18 , Kel. Sadai kec. Bengkong	1 unit
14	Pembangunan Gedung Serbaguna RW 04 Kampung Panau Kabil Nongsa	1 unit
15	Pembangunan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna (Perumahan Citra Mas RT 01/RW 05, kelurahan Batu Besar, kecamatan Nongsa)	1 unit
16	Pembangunan Balai Pertemuan Kavling Lembang Jaya RW 03 Batu Besar	1 unit
17	Pembangunan Balai Pertemuan Kavling Sambau RT 02 RW 01	1 unit
18	Pembangunan Gedung Serbaguna di RT 03 RW 02 Kampung Melayu	1 unit
19	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 02 RW 25 Kav. Lestari	1 unit
20	Pembangunan Gedung Serba Serbaguna, Bida Ayu RW 19 Mangsang, Sei Beduk	1 unit
21	Pembangunan Fasum/fasos, Bida Ayu Blok R Rw 07 Mangsang, Sei Beduk	1 unit
22	Pembangunan gedung serba guna perumahan Puri Agung II RW 06 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk	1 unit
23	Pembangunan Gedung Serbaguna di RT 05 RW 04 Kavling Nongsa	1 unit
24	Pembangunan Gedung Serbaguna di RT 05 RW 04 Kav. Sambau	1 unit
25	Pembangunan gedung serba guna Blok O RT 02 RW 02 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk	1 unit
26	Pembangunan gedung serba guna Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk	1 unit
27	Pembangunan gedung serba guna RT 04 RW 02 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk	1 unit
28	Pembangunan Balai pertemuan di RT 07 RW 06 Baloi Indah	1 unit
29	Pembangunan Pendopo/Gedung Sebaguna (Perumahan Batam Nirwana Residence, RT. 1/RW. 7, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang)	1 unit
30	Pembangunan Gedung Serba Guna di Perumahan Pondok Pertiwi 3 Blok AA4 dan AA5 RT 06 RW 16 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang	1 unit
31	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum.Melati Garden RT 01 RW 13 , Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang	1 unit
32	Pembangunan Gedung Serbaguna, Jln Tjg Keramat RW.04, Pulau Kasu.	1 unit
33	Pembangunan Gedung Serba guna perum marina raya RT 02 RW 022	1 unit
34	Pembangunan Gedung Serba Guna, Perum GPI Clauster Dahlia RT 003 RW 010	1 unit
35	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Permata Laguna RW. 17, Tanjung Uncang	1 unit
36	Rehabilitasi/peningkatan Gedung Serbaguna Kavling Saguba Asri Blok B, RT 02/RW 03, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung	1 unit
37	Pembangunan Balai Pertemuan Warga Perumahan Bumi Sakinah, RT. 02/RW. 11, kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung	1 unit
38	Pembangunan Balai Pertemuan di Perumahan Frensiana RT. 004 RW 052, Kel. Belian Kec. Batam Kota	1 unit
39	Pembangunan Gedung Serbaguna (Perum. Plamo Garden, RT. 02/RW. 01, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota)	1 unit
40	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Batu Batam Permai RT 06 RW 06 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja	1 unit
41	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Buana View RT 02 RW 23 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji	1 unit
42	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Buana View RT 01 RW 19 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji	1 unit
43	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Oma Batam Centre RT. 01 RW. 12 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Centre	1 unit
44	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 07 RW 18 Marina Green,Tanjung Uncang	1 unit
45	Pembangunan Fasum RT. 001 RW. 024 Perumahan Mutiara Indah Kel Buliang	1 unit
46	Pembangunan Gedung Serba Guna di Fasum Perumahan Anggrek Mas I, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota	1 unit
47	pembangunan gedung serba guna perumahan glory RT 02 RW 23 permai Tanjung Uncang	1 unit



No	Uraian	Jumlah
48	Pembangunan Gedung Serba Guna, Perum Anggrek Sari	1 unit
49	Pembangunan Gedung Serbaguna di Perumahan Siera RW 10 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji	1 unit
50	Pembangunan gedung serba guna Fasum Thoriq Perumahan Sakinah RT 05 RW 27 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji	1 unit
51	Pembangunan gedung serba guna Perumahan Central Park Residence RT 01 RW 23 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	1 unit
52	Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Seroja RT 03 RW 08	1 unit
53	Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Shangrila RT 04 RW 06 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Sagulung	1 unit
54	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 03 & RT 04 Perum Villa Muka Kuning Tembesi	1 unit
55	Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Seroja RW 08 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung	1 unit
56	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Taman Putri Fortuma Tahap II RT.04/RW.08 Sungai Harapan	1 unit
57	Pembangunan Gedung Serba Guna RW 30 Perumahan Bukit Palem Permai Kel. Belian	1 unit
58	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Melati Garden Sungai Harapan RW 13 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang	1 unit
59	Pembangunan Gedung Serbaguna, Perumahan Mediterania Fasum Blok ii RT. 03 RW. 08 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota	1 unit
60	Pembangunan Gedung Serbaguna RW.10 Kel, Sungai Langkai Sagulung	1 unit
61	Pembangunan Gedung Serbaguna RW.09 Sei Langkai Sagulung	1 unit
62	Revitalisasi Fasum Perumahan Taman Raya Tahap IV, Kel. Belian Kec. Batam Kota	1 unit
63	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Sekanak Raya RT. 001 / RW. 002	1 unit
64	Pembangunan Aula/Gedung Pertemuan dan Pelayanan Kantor Kelurahan Tembesi	1 unit
65	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Buana View RT. 01 RW. 23 Kelurahan Kibing	1 unit
66	Pembangunan Gedung Serba Guna RT 01 RW 01 Labun Kelurahan Pemping	1 unit
67	Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 01 RW. 04 Sei Raya Kelurahan Sembulang	1 unit
68	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Villa Alam Lestari 2 RT 02 RW 12	1 unit
69	Pembangunan Gedung Serbaguna RW 14 Bengkong Sadai Kel. Sadai	1 unit
70	Pembangunan Gedung Serbaguna Bengkong Abadi 1 RT 03,04 RW 03 , Kel. Tg. Buntung Kec. Bengkong	1 unit
71	Pembangunan Gedung Serbaguna RW 14 Tanjung Buntung Kel. Tanjung Buntung	1 unit
72	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 03 RW 15 Bengkong Swadebi Kel. Sadai Kec. Bengkong	1 unit
73	Pembangunan Gedung Serbaguna Bengkong Sadai RT 02 RW 22, Kel. Sadai Kec. Bengkong	1 unit
74	Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Senjulung RW 09 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa	1 unit
75	Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Senjulung RW 10 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa	1 unit
76	Pembangunan Gedung Serbaguna / Pertemuan Bukit Ayu Lestari RW 11, Kelurahan Mangsang / Kecamatan Sei Beduk	1 unit
77	Pembangunan Balai Pertemuan / Gedung Serba Guna RW 12 Perumahan Piayu Mas Residence Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk	1 unit
78	Pembangunan Balai Pertemuan Batu Besar RT 03 RW 04 Nongsa	1 unit
79	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Mangsang Permai Blok F RT 04 RW 01, Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk	1 unit
80	Pembangunan Balai Pertemuan Sambau RT 01 RW 02, Nongsa	1 unit
81	Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Sei Daun Blok C RT 02 RW 11 , Kel Tg. Piayu Kec. Sei Beduk	1 unit
82	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Bida Asri I Kel. Belian Kec. Batam Kota	1 unit
83	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Marchelia RT 04 RW 09 Kelurahan Taman Baloi	1 unit
84	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Modena Regency RT 005/ RW 021 Kel. Belian Kec. Batam Kota	1 unit
85	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Cactus Garden Batam RT 03/ RW 13 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota	1 unit



No	Uraian	Jumlah
86	Pembangunan Gedung Sebaguna Perumahan Patam Indah RT 07 RW 01 , Kel Patam Lestari	1 unit
87	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan The Puri RT 3 RW 15 , Kel . Patam Lestari	1 unit
88	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Benih Raya RT 05 RW 15, Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang	1 unit
89	Pembangunan Gedung Serbaguna, Patam Lestari RT. 05, 06, 07 / RW. 15	1 unit
90	Pembangunan Gedung serbaguna, Tiban Lama RW. 006, Kelurahan Tiban Lama /Kecamatan Sekupang	1 unit
91	Pembangunan Gedung Serbaguna Taman Raya Tahap 3 RT. 03 RW. 18 Kelurahan Belian Kec. Batam Kota	1 unit
92	Pembangunan Gedung Pertemuan Perumahan Citra Permata RT. 03 RW. 20 Kelurahan Bengkong Sadai	1 unit
93	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 01 RW. 15 Kelurahan Tanjung Buntung	1 unit
94	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Pesona Mantang Block C dan D RT. 03 RW. 15 Kelurahan Tanjung Buntung	1 unit
95	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 04/ RW. 28 Taman Buana Impian Kel. Tembesi Kec. Sagulung	1 unit
96	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 04/RW. 05 Perum Mantang Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung	1 unit
97	Pembangunan Gedung Serbaguna Perumnas Griya Permata Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung	1 unit
98	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 03 RW. 07 Perumahan Tiban Koperasi Kel. Tiban Baru Kec Sekupang	1 unit
99	Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 08 Kampung Melayu Kec. Nongsa	1 unit
100	Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 01 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang	1 unit
101	Pembangunan Fasilitas Umum RT. 03 RW. 10 Perumahan Villa Pesona Asri Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota	1 unit
102	Pembangunan Pendopo / Fasum / Gedung Serbaguna Perumahan Teratai III RT. 10/ RW. 19, Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung	1 unit
103	Pembangunan Gedung Serbaguna / Balai Pertemuan, Kavling Baru Sumber Mulia RT. 05 / RW. 04, Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung	1 unit
104	Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 14 Kel. Mangsang Kec. Sei. Beduk	1 unit
105	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 03 RW 10 Kelurahan Bengkong Indah	1 unit
106	Pembangunan Gedung Serba Guna RW 06 Kelurahan Tanjung Sengkuang	1 unit
107	Pembangunan Gedung Serba Guna RT 03 RW 10 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar	1 unit
108	Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Bengkong Polisi Kel. Tanjung Buntung Bengkong	1 unit
109	Pembangunan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna RT 04/RW 16, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk	1 unit
110	Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02/RW. 05, kel. Batu Besar, kec. Nongsa	1 unit
111	Pembangunan Gedung Serba Guna Punggur RT 002/ RW 001 Kel. Kabil Kec. Nongsa	1 unit
112	Pembangunan Gedung Serba Guna RT 01/ RW 05 Tg. Banun Kel. Sembulang Kec. Galang	1 unit
113	Pembangunan Balai Pertemuan/Gedung Serba Guna Kavling Kampung Manggis RT 04 RW 13 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk	1 unit
114	Pembangunan Serbaguna Perum. Gardan Raya RT 01 RW 53, Ke. Belian Kec. Batam Kota	1 unit
115	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Taman Lavender RT 01 RW 52 kel. Belian, Kec. Batam Kota	1 unit
116	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Buana Vista Indah 3 RT 06 RW 26	1 unit
117	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Aster Raya RT. 02 RW. 30 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji	1 unit
118	Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Prima Garden RT. 03 RW. 13 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji	1 unit
119	Pembangunan Gedung Serbaguna, Perumahan Melati Garden Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang	1 unit
120	Pembangunan Fasum / Gedung serbaguna, Bida KSB Blok F RT. 03 / RW. 10, Kelurahan Patam Lestari / Kecamatan Sekupang	1 unit



No	Uraian	Jumlah
121	Pembangunan Gedung serbaguna, Villa Diamond RT. 02 / RW. 20, Kelurahan Tiban Baru / Kecamatan Sekupang	1 unit
122	Pembangunan Fasum / Gedung Serbaguna Perumahan BTN Tiban Regency, Kelurahan Tiban Lama / Kecamatan Sekupang	1 unit
123	Pembangunan Gedung Serba Guna. Perumahan Muka Kuning Indah I RW. 5 RT. 04 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji	1 unit
124	Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Sagulung Mandiri, RT. 03/RW. 10, Kel. Sungai Pelunggut	1 unit
125	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Nagajaya RT 03 RW 15, Kel. Buliang Kec. Batu Aji	1 unit
126	Pembangunan Gedung Serbaguna Bukit Raya RT. 01, 02, 03 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota	1 unit
127	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Senawangi RT 01 RW 08 Kel. Buliang Kec, Batu Aji	1 unit
128	Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Indo Mas 2 RT 02 RW 022 Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji	1 unit
129	Pembangunan Gedung Serbaguna RT 09 RW 04 Teluk Bakau Kel. Pulau Terung Kec. Belakang Padang	1 unit
130	Pembangunan bahu jalan/trotoar di jalan utama perumahan taman batu aji indah III RW 07	1 unit
131	Pembangunan Gedung Arsip/Warkah Kantor Pertanahan Kota Batam	1 unit
132	Pembangunan Rusun Mako Brimob Polda Kepri	1 unit
133	Pembangunan Pengamanan Rumah Dinas Kapolresta Bareleng Kota Batam (Dana Tanggap Darurat)	1 unit
134	Pembangunan Gedung Serbaguna Rutan Batam	1 unit
135	Pembangunan Gedung Sentral Pelayanan Publik Polresta Bareleng	1 unit
136	Penambahan Ruang Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sekupang	1 unit
137	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre	1 unit
138	Pemeliharaan Gerbang Bandara Hang Nadim	1 unit
139	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah	1 unit
JUMLAH		139 unit

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran:

1. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana publik dan masyarakat umum menjadi lebih representatif.
2. Adanya komitmen antar personil yang terlibat untuk bersama-sama mencapai target yang sudah ditetapkan.
3. Adanya ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dan peningkatan bangunan/gedung pemerintah dan masyarakat dapat segera dilakukan

Faktor-faktor yang menghambat/ kendala pencapaian sasaran:

1. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat jasa konstruksi untuk bekerja secara profesional di bidangnya secara utuh (teknis dan administratif)
2. Adanya kendala dalam penyediaan lahan
3. Adanya kendala dalam penghapusan asset sehingga memperpanjang proses pelaksanaan



SASARAN STRATEGIS III :

Tersedianya Kualitas Dan Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi, Dan Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Oleh Pelaku Usaha/ Jasa Serta Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Tabel 3.7. :
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN III

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	14	15	16	17
1	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persen	17.23	17.66	102.5	17.66

Pengukuran terhadap keberhasilan adalah pelaksanaan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi Dengan kondisi tersebut di atas dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas agar lebih memberikan kenyamanan pelayanan pelaksanaan tenaga terampil konstruksi, penyediaan informasi serta pengawasan dan pemanfaatan jasa konstruksi.

Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan untuk pelaksanaan yang berhubungan dengan pelayanan jasa konstruksi adalah :

1. Sertifikasi tenaga terampil konstruksi sebanyak 218 peserta
2. Pengadaan aplikasi “Sijakon” untuk informasi pelaku usaha
3. Pengawasan pelaksanaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak 40 dokumen



SASARAN STRATEGIS IV :
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Air Bersih

Tabel 3.8. :
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN IV

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	14	15	16	17
1	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Persen	43.49	43.85	100.83	43.85

Pengukuran dilaksanakan atas Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis, Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Operasional/Pemeliharaan SPAM di Wilayah Hinterland dengan jumlah SR akhir tahun 2021 berjumlah 6.485 SR atau sekitar 25.940 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan SPAM baru di beberapa lokasi dan penambahan jaringan SR serta penyambungan SR Mandiri di Kegiatan BLUD. Untuk mencapai target yang telah disepakati di dalam RPJMD Tahun 2021 s.d 2026 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam di tahun 2021 telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 6 sub kegiatan guna meningkatkan pelayanan air bersih yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebanyak 1 paket kegiatan (DAK Penugasan) serta kegiatan yang bersumber dari APBD Kota (termasuk 1 kegiatan yang pengelolaan dana operasionalnya bersumber dari Pendapatan BLUD Penyediaan Air Bersih yang perencanaan keuangannya melalui Rencana Bisnis Anggaran /RBA).

Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan pelayanan air bersih diantaranya :

1. DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Nguan Kec. Galang
2. DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Sembur Kec. Galang
3. Pembangunan SPAM di Pulau Petong Kel. Pulau Abang Kec. Galang (117 SR atau 468 jiwa)
4. Pembangunan SPAM Kampung Baru Kel. Subang Mas Kec. Galang (DAK Penugasan) (86 SR atau 344 jiwa)
5. Optimalisasi WTP Belakang Padang
6. Optimalisasi WTP Bulang Lintang



7. Optimalisasi WTP Geranting
8. Optimalisasi WTP Kasu
9. Optimalisasi WTP Mecan
10. Peningkatan SPAM Pulau Ngenang Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa (13 SR atau 52 jiwa)
11. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Ngenang Kec. Nongsa (57 SR atau 228 jiwa)
12. Pemasangan Mandiri di UPT. PAB (86 SR atau 344 jiwa)

Tabel 3.9. :
REKAPITULASI SR AIR BERSIH KOTA BATAM S.D AKHIR TAHUN 2021

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Kec/Kel	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	NAMA WADUK	Ket
1.	WTP Belakang Padang	Belakang Padang	1.238	4.952	Waduk Sekanak 1 Dan Sekanak 2	Waduk dan Tadah Hujan
2	WTP Mecan	Pulau Mecan	264	1.056	WADUK MECAN	Waduk dan Tadah Hujan
3	WTP Pemping	Pulau Pemping	208	832	WADUK PEMPING	Waduk dan Tadah Hujan
4	WTP Kasu	Kasu	211	844	Waduk Sungai Lumba	Waduk dan Tadah Hujan
5	WTP Ngenang	Ngenang	173	692	Waduk Ngenang	Waduk dan Tadah Hujan
6	WTP Pecung	Pecung	239	956	Waduk Tanjung Kerang	Waduk dan Tadah Hujan
7	WTP Bulang	Bulang Linta	231	924	Waduk Bulang Lintang	Waduk dan Tadah Hujan
8	WTP Geranting	Pulau Terong	192	768	Waduk Pulau Riang	Waduk dan Tadah Hujan
9	WTP Terong	Pulau Terong	273	1,092	Waduk Air Batang	Waduk dan Tadah Hujan
10	WTP Setokok	Pulau Setoko	111	444	Waduk Setokok	Waduk dan Tadah Hujan
11	WTP Air Raja	Air Raja	150	600	Waduk Air Raja	Waduk dan Tadah Hujan
12	WTP Subang Mas	Subang Mas	68	272	Waduk Subang Mas	Waduk dan Tadah Hujan
13	WTP Rempang Cate	Rempang Cate	137	548	Waduk Rempang Cate	Waduk dan Tadah Hujan
14	WTP Sembulang	Sembulang	80	320	Tangkapan Air Sembulang	Tangkapan Air
15	WTP Pulau Abang	Pulau Abang	281	1,124	Waduk Pulau Abang	Waduk dan Tadah Hujan
16	IKK Tiangwangkang	Tembesi	437	1,748		PT. ATB/SPAM BATAM
17	IKK Pulau Buluh	Pulau Buluh	556	2,224		PT. ATB/SPAM BATAM
18	SWRO Belakang Padang	Sekanak Raya	774	3,096		Air Laut
19	WTP Jaloh	Pantai Gelam	228	912	Waduk Pulau Jaloh	Waduk dan Tadah Hujan
20	WTP Temoyong	Temoyong	159	636	Waduk Temoyong	Waduk dan Tadah Hujan
21	WTP Air Gara Bertam	Kasu	172	688	Waduk Bertam	Waduk dan Tadah Hujan
22	WTP Tanjung Banun	Sembulang	98	392	Waduk Tanjung Banun	Waduk dan Tadah Hujan



No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Kec/Kel	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	NAMA WADUK	Ket
23	WTP Petong		119	476		Waduk dan Tadah Hujan
24	WTP Kp. Baru Galang		86	344		Waduk dan Tadah Hujan
JUMLAH			6.485	25.940		

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran :

1. Adanya komitmen dari semua Stage Holder untuk percepatan penuntasan infrastruktur layanan air bersih untuk semua wilayah Hinterland dan kawasan yang menjadi tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Pada Tahun 2021 dirancang peningkatan penanganan sumber-sumber air di wilayah Hinterland yang memiliki sumber air baku dan atau yang memiliki konektivitas jaringan pipa ATB terdekat. Selain itu keterlibatan masyarakat berupa hibah lahan ikut punya andil yang besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secepatnya dapat tercapai
2. Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman di wilayah Hinterland juga mendapat dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat setempat.
3. Pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih sampai pada meteran didepan rumah
4. Yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari Pemerintah Pusat melalui penyediaan dana DAK untuk penyediaan sarana air bersih.

Faktor-faktor yang menghambat / kendala pencapaian sasaran :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam sangat tinggi, sehingga berakibat sulitnya membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan.
2. Sulitnya dan terbatasnya sumber air baku yang tersedia kurang memadai untuk dilakukan pengolahan air bersih sampai mengalir ke rumah-rumah, bahkan ada sebagian lokasi WTP hanya mengandalkan sumber air hujan.
3. Lokasi yang akan dijadikan pengolahan air bersih merupakan pulau-pulau kecil hanya berpenduduk tidak kurang dari 100 jiwa, sehingga menimbulkan coast yang tidak sedikit.



SASARAN STRATEGIS V :
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sanitasi

Tabel 3.10. :
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN V

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	14	15	16	17
1	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	Persen	12.22	12.16	99.51	12.16

Selain melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur penyediaan air bersih di Hinterland, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam juga melaksanakan kegiatan infrastruktur untuk menunjang penyediaan sanitasi yang layak. Pengukuran sanitasi dilakukan dengan penyediaan system penanganan limbah secara komunal atas pemasangan jaringan sanitasi (SR/Sambungan Rumah) di wilayah Hinterland dan kelurahan di mainland yang merupakan lokasi pesisir pantai dengan jumlah SR akhir tahun 2021 berjumlah 1.799 atau sekitar 8.995 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan baru Tangki Septitank Skala Komunal di beberapa lokasi. Daftar pekerjaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan sanitasi diantaranya :

1. Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan Pulau Akar Kel. Setokok Kec. Bulang (1 lokasi)
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Temoyong Kec. Bulang (DAK Penugasan) (10 unit = 90 SR/ 450 jiwa)
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Galang Baru Kec. Galang (DAK Penugasan) (10 unit = 90 SR/ 450 jiwa)
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Batu Merah Kec. Batu Ampar (DAK Penugasan) (5 unit = 39 SR/ 195 jiwa)



Tabel 3.11. :
REKAPITULASI SR SANITASI KOTA BATAM s.d akhir Tahun 2021

No	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Keterangan
1.	P. Bulang Lintang	Bulang Lintang/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.Bulang Lintang	Pembangunan di Tahun 2011
2.	P. Jaloh	Pantai Gelam/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.Jaloh	Pembangunan di Tahun 2011
3.	P. Mecan	Sekanak Raya Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.Mecan	Pembangunan di Tahun 2011
4.	P. Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.Geranting	Pembangunan di Tahun 2011
5.	Kampung Bukit	Tanjung Riau/Sekupang	IPAL Komunal	29	145	KSM Kampung Bukit	Pembangunan di Tahun 2012
6.	Tanjung Sengkuang	Tanjung Sengkuang/Batu Ampar	IPAL Komunal	23	115	KSM Tanjung Sengkuang	Pembangunan di Tahun 2012
7.	Bulang Kebam	Bulang	MCK+	25	125	KSM Bulang Kebam	Pembangunan di Tahun 2012
8.	Tanjung Riau	Tanjung Riau/Sekupang	MCK+	25	125	KSM Pulau Seraya	Pembangunan di Tahun 2012
9.	Air Raja	Air Raja/Galang	IPAL Komunal	38	190	KSM Air Raja	Pembangunan di Tahun 2015
10.	P. Abang	Pulau Abang/Galang	IPAL Komunal	132	660	KSM Pulau Abang	Pembangunan di Tahun 2015
11.	P. Pemping	Pemping/Belakang Padang	IPAL Komunal	38	190	KSM Lancang Kuning	Pembangunan di Tahun 2016
12.	Sagulung	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	57	285	KSM Tiangwangkang Sukses	Pembangunan di Tahun 2016
13.	Setokok	Setokok/Bulang	IPAL Komunal	70	350	Cv. Adelia Pratama	Pembangunan di Tahun 2016
14.	Pecung	Pecung/Belakang Padang	IPAL Komunal	41	205	KSM Pecung Mandiri	Pembangunan di Tahun 2017
15.	Kabil	Kabil/Nongsa	IPAL Komunal	44	220	KSM Punggur Sehat Sejahtera	Pembangunan di Tahun 2017
16.	Subang Mas	Subang Mas/Galang	IPAL Komunal	41	205	KSM Subang Mas Cemerlang	Pembangunan di Tahun 2017
17.	Sekanak	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	75	375	KSM Melayu Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
18.	Pulau Lengkang	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM Lengkang Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
19.	Pulau Mecan	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	48	240	KSM Mecan Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
20.	Pulau Sarang	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM Sarang Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
21.	Pulau Kasu	Kasu/Belakang Padang	Komunal Kombinasi	225	1,125	KSM Kasu Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
22.	Pulau Ngenang	Ngenang/Nongsa	IPAL Komunal	75	375	KSM Ngenang Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
23.	Pulau Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	IPAL Komunal	105	525	Hinterland Berbakti	Pembangunan di Tahun 2019
24.	Pulau Karas	Karas/Galang	IPAL Komunal	84	420	KSM Galang Gemilang	Pembangunan di Tahun 2019
25.	Pulau Lance	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	35	175	Lance Gemilang Permai	Pembangunan di Tahun 2019
26.	Tanjung Riau Kecamatan	Tanjung Riau/Sekupang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Tanjung Riau Elok	Pembangunan di Tahun 2020
27.	Rempang Cate	Rempang Cate/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Cate Bersih	Pembangunan di Tahun 2020
28.	Sembulang	Sembulang/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	20	100	KSM Sembulang Jaya	Pembangunan di Tahun 2020
29.	Bulang Lintang Kecamatan	Bulang Lintang/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	30	150	KSM Bulang Lestari	Pembangunan di Tahun 2020



No	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Keterangan
30	Pantai Gelam Kecamatan	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Maju Bersama	Pembangunan di Tahun 2020
31	Temoyong	Temoyong/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	90	450	KSM Batu Merah Bersatu	Pembangunan di Tahun 2021
32	Galang Baru	Galang Baru/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	90	450	KSM Kelurahan Galang Baru	Pembangunan di Tahun 2021
33	Batu Merah	Batu Merah/Batu Ampar	Tangki Septik Skala Komunal	39	195	KSM Tuah Anak Negeri	Pembangunan di Tahun 2021
TOTAL				1.799	8.995		

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran :

1. Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman di wilayah Hinterland juga mendapat dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat setempat.
2. Yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari Pemerintah Pusat melalui penyediaan dana DAK untuk penyediaan sanitasi komunal.

Faktor-faktor yang menghambat / kendala pencapaian sasaran :

1. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana sanitasi yang mengalami kerusakan kurang optimal, sehingga pemeliharaan menunggu dana dari Pemerintah.
2. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam sangat tinggi, sehingga berakibat sulitnya membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan.

SASARAN STRATEGIS VI :

Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 3.12. :
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN VI**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD S.d Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	14	15	16	17
1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100

Pelaksanaan rutinitas yang dilaksanakan guna terlaksananya pelaksanaan pengadministrasian keuangan, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang,



penyediaan jasa, pemeliharaan barang serta pelaksanaan pelayanan BLUD UPT Pelayanan Air Bersih.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran :

1. Komitmen dari pimpinan untuk pelaksanaan pengadministrasian tetap terlaksana walaupun kondisi keuangan yang mengalami defisit.

3.3. REALISASI KEUANGAN

Pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun anggaran 2021 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam **Rp. 155.613.739.173,-** dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan sebesar **Rp 156.018.298.705,-**

Tabel 3.13. :
REALISASI KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Langsung	156.018.298.705,-	143.719.969.192,-	92.12 %
SISA ANGGARAN		12.297.139.778,-		7.88%

Sedangkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis didukung dengan anggaran yang disediakan sesuai dengan Penetapan Kinerja berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.14. :
Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	% Penyerapan Dana
I	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3,511,795,000	3,007,722,700	504,072,300	85.65%
			1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3,216,800,000	2,811,845,200	404,954,800	87.41%
			1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3,216,800,000	2,811,845,200	404,954,800	87.41%
			2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	128,600,000	123,500,000	5,100,000	96.03%
			2.1 Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	128,600,000	123,500,000	5,100,000	96.03%
			3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	166,395,000	72,377,500	94,017,500	43.50%
			3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	166,395,000	72,377,500	94,017,500	43.50%
II	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Program Penataan Bangunan Gedung	75,012,959,248	67,990,608,103	7,022,351,110	90.64%
			1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	75,012,959,248	67,990,608,103	7,022,351,110	90.64%
			1.1 Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	65,164,513,325	61,505,925,712	3,658,587,613	94.39%
			1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	67,320,000	16,020,000	51,300,000	23.80%
			1.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	29,964,011,484	27,862,471,369	2,101,540,115	92.99%



No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	% Penyerapan Dana
III	Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa konstruksi serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	200,471,000	176,479,240	23,991,760	88.03%
			1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	63,581,000	61,689,240	1,891,760	97.02%
			1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	63,581,000	61,689,240	1,891,760	97.02%
			2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115,000,000	99,500,000.00	15,500,000	86.52%
			2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	115,000,000	99,500,000.00	15,500,000	86.52%
			3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	21,890,000	15,290,000.00	6,600,000	69.85%
			3.1 Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	21,890,000	15,290,000.00	6,600,000	69.85%
IV	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	54,708,665,371	51,605,930,667	3,102,734,704	94.33%
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	54,708,665,371	51,605,930,667	3,102,734,704	94.33%
			1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	660,000,000	629,623,060	30,376,940	95.40%
			1.2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	17,386,090,000	16,467,209,329	918,880,671	94.71%
			1.3 Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	26,711,905,000	25,536,403,301	1,175,501,699	95.60%
			1.4 Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	287,699,500	285,563,587	2,135,913	99.26%
			1.5 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	9,662,970,871	8,687,131,390	975,839,481	89.90%



No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	% Penyerapan Dana
V	Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,249,481,600	3,245,828,306	2,463,594	99.89%
			1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,249,481,600	3,245,828,306	2,463,594	99.89%
			1.1 Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	150,000,000	148,750,550	1,249,450	99.17%
			1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	281,142,400	279,928,256.00	1,214,144	99.57%
			1.3 Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2,818,339,200	2,817,149,500	1,189,700	99.96%
VI	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,334,926,486	17,693,400,176	1,641,526,310	91.51%
			1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,025,069,808	9,334,871,755	690,198,053	93.12%
			1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,778,979,808	9,145,301,755	633,678,053	93.52%
			1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	246,090,000	189,570,000	56,520,000	77.03%
			2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,680,000	60,280,000	400,000	99.34%
			2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60,680,000	60,280,000	400,000	99.34%
			3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	598,795,000	445,461,093	153,333,907	74.39%
			3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,852,500	7,845,500	7,000	99.91%
			3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187,524,500	174,773,120	12,751,380	93.20%
			3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,455,500	37,265,120	11,190,380	76.91%
			3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,037,500	28,027,500	1,010,000	96.52%
			3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	94,560,000	94,135,000	425,000	99.55%
			3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,471,500	15,345,500	126,000	99.19%



No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	% Penyerapan Dana
			4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,387,796,000	2,322,350,000	65,446,000	97.26%
			4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,406,490,000	1,402,500,000	3,990,000	99.72%
			4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	1,406,490,000	1,402,500,000	3,990,000	99.72%
			4.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159,875,000	158,560,000	1,315,000	99.18%
			5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,318,728,760	1,244,808,769	73,919,991	94.39%
			5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224,093,400	174,267,950	49,825,450	77.77%
			5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,591,000	1,496,800	2,094,200	41.68%
			6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473,698,459	370,558,978	103,139,481	78.23%
			6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166,866,600	71,471,300	95,395,300	42.83%
			6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,400,000	6,052,300	12,347,700	32.89%
			6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148,466,600	65,419,000	83,047,600	44.06%
			7 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	4,470,158,459	3,915,069,581	555,088,878	87.58%
			7.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4,470,158,459	3,915,069,580	555,088,878	87.58%
TOTAL PAGU				156,018,298,705	143,719,969,192	12,297,139,778	92.12%



4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator menunjukkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten.
Didukung anggaran dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar **Rp. 3.511.795.000,-** atau **2.25 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 3.007.722.700,-** atau **2.09 %**

Indikator Sasaran : Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **54.95 %** terrealisasi sebesar **78.24 %** dengan interpretasi **Melampaui Target (142,38%)**

Sasaran Strategis II : Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.
Didukung anggaran dari Program Penataan Bangunan Gedung sebesar **Rp. 75.012.959.248,-** atau **48.08 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 67.990.608.103,-** atau **47.31 %**

Indikator Sasaran : Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan



- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **16.67 %** terrealisasi sebesar **21.82 %** dengan interpretasi **Melampaui Target (130.89%)**

Sasaran Strategis III : Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi. Didukung anggaran dari Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar **Rp. 200.471.000,-** atau **0.13 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 176.479.240,-** atau **0.12 %**

Indikator Sasaran : Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **17.23 %** terrealisasi sebesar **17.66 %** dengan interpretasi **Melampaui Target (102.5%)**

Sasaran Strategis IV : Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih. Didukung anggaran dari Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar **Rp. 54.708.665.371,-** atau **35.07 %** dari Total pagu Dinas. Realisasi sebesar **Rp. 51.605.930.667,-** atau **35.91 %**

Indikator Sasaran : Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **43.49 %** terrealisasi sebesar **43.85 %** dengan interpretasi **Melampaui Target (102.5%)**

Sasaran Strategis V : Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi.



Didukung anggaran dari Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar **Rp. 3.249.481.600,-** atau **2.08 %** dari Total pagu Dinas.

Indikator Sasaran : Realisasi sebesar **Rp. 3.245.828.306,-** atau **2.26 %**
Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **12.22 %** terrealisasi sebesar **12.16 %** dengan interpretasi **tidak mencapai Target (99.51%)**

Sasaran Strategis : Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah VI

Didukung anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 19.334.926.486,-** atau **12.39 %** dari Total pagu Dinas.
Realisasi sebesar **Rp. 17.693.400.176,-** atau **12.31 %**

Indikator Sasaran : Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah

- Capaian Kinerja pada tahun 2021 dengan target **100 %** terrealisasi sebesar **100 %** dengan interpretasi **mencapai Target (102.5%)**

Dari 6 (enam) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, capaian kinerja rata-rata pada tahun 2021 dengan interpretasi **Melampaui Target**.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang bersumber dari APBD Perubahan sebesar **Rp. 156.018.298.705,-** dan realisasi pengeluaran sebesar **Rp. 143.719.969.192,-** mencapai **92.12 %** dengan sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 12.297.139.778,-** atau **7.88%.**



4.2.REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kegiatan perencanaan/ DED (*Detail Engineering Design*) dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan fisik dapat dilakukan pada awal tahun sehingga waktu pekerjaan fisik lebih efisien .
- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi penyedia jasa konstruksi dengan berkerjasama baik dengan Kementerian PUPR maupun lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi - asosiasi yang terkait dengan konstruksi.
- c. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum baik dari segi perencanaan dan pengawasan/*supervise* yaitu dengan peningkatan kualitas manajemen proyek dari suatu program dan kegiatan. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam melalui pendidikan dan pelatihan teknis.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- e. Meningkatkan kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan serta penetapan target kinerja yang lebih cermat dan akurat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, serta faktor - faktor yang terkait lainnya, sehingga Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal dan dapat meminimalisir kendala-kendala di lapangan.

Plh. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



M.ARMAN, S.STP

Pembina TK. I

NIP. 19800909 199912 1 002

